

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013
- Angkasa, Nitaria. et.al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: Ladun, 2019)
- Anwar, Saiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.
- Hadayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1981, Bumi Aksara.
- Handbook Pemerintahan Daerah. N.p.: Wahana Resolusi, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006,
- Nawaw, Hadari. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, 1989.
- Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). N.p.: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Rahau Sri Ani, "Pengantar Pemerintahan Desa", (Malang: Sinar Grafika, 2018).
- Soejito, Irawaan. *pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Cet. Ketiga, Rajawali Pers Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017, 3.

Surnano, Siswato. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Mei 2016.

Viktor. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta Mei 1994, Hlm. 20.

Widiyanti Ninik dan Sunindhia. Kepala Daerah dan Pengawasan Dari pusat, Bina Aksara, Desember, 1987.

Jurnal

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2018). Panduan Praktis Inventarisasi Aset Desa. Jakarta 2–20.

Erwan, Agus. (2017). Pengelolaan Aset Desa: Panduan Praktis Bagi Aparatur Desa dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2–34.

Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur. (2021). PENGELOLAAN ASET DESA: LKMD, Media Pelaporan Kekayaan Desa. Surabaya: IAI Jawa Timur. 1–24.

Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). N.p.: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018. hal. 81–98

Peraturan Perundang – Undangan

UNDANG-UNDANG RI, “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014, TENTANG DESA,” 2014,

UNDANG-UNDANG RI, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERTINTAHAN DAERAH,” 2014,

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB I Pasal 1 No. 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Website

Jogjakartanws. (31 Desember 2020). Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi di DIY Sepanjang 2020 Cukup Fantastis. Jogjakartanews. Diambil dari <https://jogjakartanews.com>.

Jogjakartanws. (31 Desember 2020). Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi di DIY Sepanjang 2020 Cukup Fantastis. Jogjakartanews. Diambil dari <https://jogjakartanews.com>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta,Balai Pustaka:2002),
Sejara dan Sosial, “Memahami Usia Produktif Menurut WHO yang sering terabaikan” kumparan.com. Diakses pada Minggu 16 Juni 2024.
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-usia-produktif-menurut-who-yang-sering-terabaikan-21HF4MQDsU0>.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004).

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Aset Desa Banyuraden Bersama Bapak Hendy Indra Utama.
S.I.P., Sekretaris Desa Banyurden Pada Tanggal 30 Mei 2024, Pkl.
13.00.

Hasil Wawancara Aset Desa Banyuraden bersama Bapak Yuyun Afnan Anjar
KAUR DANARTA Desa BanyuradenP,.S.E Pada Tanggal 1 July 2024,
Pkl 14.00.